

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil selaku pegawai pemerintah dan penduduk dituntut membuktikan kemampuan serta berperan secara optimal terhadap pembangunan nasional. Sehingga dibutuhkan pembangunan aparatur pemerintahan yaitu pegawai yang mana ditunjukkan dalam terwujudnya administrasi publik yang sanggup menjamin kelancaran serta keterpaduan tugas, guna penyelenggaraan pemerintahan serta sistem administrasi yang handal, profesional, efisien, serta efektif. Pelaksanaan serta tahap penggunaan administrasi butuh tetap dilanjutkan dengan menaikkan sumber daya manusia serta kesejahteraannya. Pemerintah selaku lembaga dalam menunjukkan kemampuan pelayanan publik yang besar tertentu saja wajib dibantu oleh sumber daya yang ada.

Dalam penyelenggaraan Negara buat menciptakan negara yang baik (*good governance*) yakni pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, serta sanggup menanggapi transformasi dengan cara efektif. Pemerintah selaku suatu badan dalam menunjukkan kemampuan pelayanan publik yang besar pasti mesti dibantu oleh sumber daya manusia memiliki peran utama untuk mewujudkan pembangunan nasional, maka yang harus dinilai dari pegawai adalah kinerjanya. Pendapat mangkunegara, A.P. (2016:67) menyatakan kalau kinerja adalah hasil kegiatan dengan tata cara mutu serta kuantitas yang diraih oleh seseorang ketika menyelenggarakan

tugas serupa dengan tanggungjawab yang dikasihkan padanya. Hasil kegiatan yang diharapkan merupakan hasil standar yang disusun sebagai referensi maka bisa memandang kemampuan sesuai dengan posisinya dibanding dengan standar yang ada. Tidak hanya itu bisa juga diamati kepada pegawai yang lain. Berlandaskan opini mengenai kinerja dapat disimpulkan kalau kinerja memiliki substansi perolehan hasil kegiatan oleh seorang. Dengan begitu kinerja ataupun hasil kegiatan ialah gambaran hasil yang dicapai oleh seorang ataupun kelompok.

Sebagaimana pula dengan munculnya UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi sarana buat menciptakan aparatur sipil Negara selaku bagian dari pembaruan birokrasi, untuk itu diresmikan aparatur sipil Negara selaku pekerjaan yang mempunyai peranan mengatur serta meningkatkan diri serta harus bertanggungjawab melakukan kinerjanya serta mempraktikkan prinsip pada penerapan administrasi aparatur sipil Negara, UU tersebut ditunjukkan Untuk Pegawai Negeri Sipil yang menjadi salah satu bagian didalam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Secara umum, kinerja mengacu pada mutu serta banyaknya pekerjaan yang bisa diselesaikan bagi seseorang tenaga kerja dalam melakukan kewajiban utama serta fungsi karyawan serupa dengan kewajiban yang diberatkan ataupun didelegasikan untuknya. Mangkunegara (2002:67) menegaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan secara kualitas dan kuantitas oleh seseorang dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing, dalam mencapai tujuan lembaga secara hukum, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan hukum, berkarakter dan beretika.

Perpustakaan membutuhkan wawasan serta teknis khusus supaya sanggup meningkatkan kinerjanya. Kesuksesan tugas serta guna sesuatu perpustakaan amat terkait pada pandangan keahlian serta dorongan pustakawannya. Tidak hanya itu kepatuhan serta pengabdian yang baik pada pekerjaan, jujur dalam melakukan kewajiban serta patuh dalam melayani konsumen, sehingga pengunjung membaca referensi di perpustakaan untuk jangka waktu yang lebih lama dan dalam suasana yang lebih nyaman. Untuk itu, dibutuhkan *training* serta pengembangan khusus di aspek khusus supaya bisa menanggapi serta melayani konsumen yang membutuhkan data serta informasi dalam waktu yang cepat serta tepat.

Penetapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menjabarkan bagaimana sistem akuntabilitas yang sesuai, cepat, dan diakui secara hukum harus dikembangkan dan dilaksanakan. Lembaga diamanatkan oleh Inpres untuk membuat sistem manajemen strategis yang fokus pada kapabilitas yang sebanding, kategorisasi konsep strategis, perencanaan kemampuan, serta penilaian atas kesuksesan, dan penerapan kewajiban utama serta fungsi kearah pendapatan visi badan.

Semakin besarnya kedudukan sesuatu lembaga negara didalam publik menimbulkan lembaga negara itu juga mengalami desakan yang lebih besar. Desakan itu antara lain merupakan desakan kepada kenaikan efektivitas lembaga. Pada dasarnya kenaikan kemampuan organisasi negara tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang ada ataupun dituturkan pula dengan Administrator, salah satu sumber daya yang

mempunyai kedudukan lumayan besar kepada efektivitas lembaga negara merupakan sumber daya manusia.

Keberhasilan sesuatu lembaga baik besar ataupun kecil bukan sekedar ditetapkan akibat sumber daya alam yang ada, melainkan banyak ditetapkan oleh kualitas sumber daya manusia yang berfungsi merancang, melakukan serta mengatur lembaga yang berkaitan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yakni salah satu aspek yang amat vital untuk lembaga. Aspek manajemen sesuatu lembaga dibutuhkan buat menggapai tujuan lembaga dengan cara optimal, tidak hanya itu pula pengawasan ialah salah satu fungsi yang wajib dicoba buat melindungi supaya penerapan aktivitas serupa dengan konsep yang sudah diresmikan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan pada anak buah dapat mendesak anak buah melaksanakan pekerjaan dengan ketertiban kerja yang tinggi. Pengawasan kegiatan kepada pegawai yang berjalan dengan baik pula akan mengurangi tingkatan kekeliruan para pegawai dengan keberadaan pengawasan di satuan kerja hendak menaikkan disiplin kegiatan pegawai, alibi dalam Industri apapun disiplin kegiatan ialah perihal yang tidak dapat tertunda. Terdapatnya aksi pengawasan akan menolong atasan dalam menata pelaksanaan pekerjaan kesempatan Perpustakaan mempunyai kewajiban utama buat membantu publik dengan membagikan peluang dengan dukungan lewat pelayanan jasa perpustakaan supaya warga bisa melatih dirinya sendiri secara berkelanjutan. Perpustakaan ialah tempat kumpulan informasi yang bersifat ilmu wawasan, hiburan, rekreasi yang merupakan keinginan mendasar individu serta

tempat memelihara dan tingkatkan kemampuan serta efektifitas cara belajar mengajar.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, ialah badan pemerintahan yang bertugas dibidang pelayanan kepada pemustaka, baik dokumen ataupun non dokumen, bidang pembinaan serta pemeliharaan arsip memiliki kewajiban merumuskan serta melakukan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan arsip daerah dan melakukan kewajiban dekonsentrasi dan kewajiban pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan yang ada khususnya diwilayah provinsi Kepulauan Riau untuk membina berkaitan dengan pelayanan, pengembangan sarana dan prasarana, koleksi, pembinaan dan pelayanan arsip secara terus menerus agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau ialah salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kedudukan besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengetahuan untuk masyarakat. Perpustakaan memberikan peran yang signifikan dan luas dalam memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Hal ini karena perpustakaan merupakan salah satu komponen organisasi yang menawarkan bahan pustaka sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 yang mengatur mengenai perpustakaan secara umum, perpustakaan yaitu suatu lembaga yang menguasai koleksi hasil ciptaan manusia yang diperlukan untuk melengkapi keperluan belajar dan penelitian. Pelestarian, data serta rekreasi para konsumen.

Tujuan perpustakaan pada dasarnya merupakan selaku sarana data yang diperlukan oleh dosen, guru, anak didik serta mahasiswa dan pegawai serta publik alhasil cara penyebaran data bisa berjalan dengan bagus.

Kapasitas suatu lembaga untuk meraih tujuannya sangat bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki setiap pegawai. Oleh karena itu, sektor ini perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang efektif karena ini bukan hanya kegiatan strategis tetapi juga merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk tujuan lembaga. Pengawasan serta tingkatan disiplin yang besar oleh pihak industri supaya bisa menciptakan informasi yang cermat tentang kemampuan para pegawai, dengan begitu keberlangsungan sesuatu industri tergantung oleh kemampuan pegawai. Tidak hanya pengawasan untuk memperoleh kemampuan yang diinginkan, komunikasi yang efisien antara pimpinan serta anak buah dalam institusi amat dibutuhkan. Penerapan komunikasi yang efisien bisa digapai dengan mencermati iklim komunikasi serta jaringan komunikasi. Terdapatnya iklim komunikasi amatlah berguna karena iklim institusi bisa mempengaruhi cara hidup anggotanya, pada siapa berdiskusi, siapa yang disenangi, gimana metode kerjanya gimana kemajuannya, apa yang mau digapai serta gimana cara menyesuaikan diri. Supaya pegawai mempunyai peluang beraktualisasi serta menggunakan peluang beraktualisasi itu hingga industri harus menghasilkan lingkungan kerja yang memberikan kenyamanan untuk pegawai guna mengantarkan ide serta mengaktualisasikan dirinya diperusahaan.

Terwujudnya tujuan yang diinginkan organisasi sebenarnya tidak lain adalah tujuan kepemimpinan, karena setiap kegiatan selalu memiliki tujuan tertentu. Nasihat

pekerjaan karenanya mutlak diperlukan dengan cara yang berorientasi pada kinerja, hasil kerja yang baik dan berkualitas tinggi dicapai dengan nasihat yang baik. Peran pengawasan dalam suatu organisasi perkantoran dapat dipandang sebagai masalah yang sangat penting ketika terjadi suasana kekacauan dalam kehidupan organisasi, baik karena faktor dari dalam lingkungan organisasi maupun dari luar lingkungan organisasi.

Tentu saja, saat Anda bekerja di bidang apa pun, penting untuk merencanakan dan mengontrol. Perencanaan dan pengendalian (pemantauan) merupakan dua kutub dari proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah awal dari proses. Meliputi kegiatan berwawasan ke depan, berwawasan ke depan dan berwawasan ke depan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kontrol mengacu pada tindakan korektif dalam setiap aktivitas. Sebagus apapun sebuah rencana, bisa gagal jika pelaksanaannya tidak dibarengi dengan kegiatan pengelolaan berupa pengawasan.

Pentingnya kinerja merupakan hal yang penting sekali, karena kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada bagaimana pegawai tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, setiap organisasi selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Berdasarkan pengamatan, kinerja staf layanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Nusantra Kepulauan Riau secara umum sudah baik, staf bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing departemen. Namun walau demikian ada beberapa masalah yang berkaitan dengan kinerja pegawai di layanan perpustakaan yaitu masih ada sebagian kecil pegawai yang

terkadang melakukan kesalahan dalam bekerja, sehingga perlu perbaikan sehingga memperpanjang waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Kendala lain adalah masih ada sebagian pegawai yang kurang bisa memanfaatkan waktu, artinya pegawai yang seharusnya bekerja malah melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya mengobrol dengan teman temannya walau hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai menjadi sangat penting untuk dibahas dan diteliti, hal ini bermaksud untuk melihat apakah dengan diadakannya pengawasan ini dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkenaan dengan pengawasan, kinerja pegawai yang berjudul:

“Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Di Layanan Perpustakaan (Studi Kasus Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan Fenomena diatas, maka peneliti bisa menarik sebuah rumusan masalah yakni “Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai di Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ?”

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan di layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Untuk mengetahui kinerja pegawai di layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Untuk mengetahui Pengawasan terhadap kinerja pegawai di Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa berguna sebagai materi masukan buat pertimbangan serta sumbangan pikiran yang berguna tentang permasalahan pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai di Layanan Perpustakaan pada Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan bisa menambah informasi dan pengalaman terhadap kajian-kajian yang peneliti pelajari selama dibangku perkuliahan pada bidang administrasi negara, fakultas ilmu sosial, dan khususnya tentang pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai di Layanan Perpustakaan pada Dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.